

**Peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam
Penegakan Hukuman Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil
di Kabupaten Banyumas**

Oleh :

ERIN PRADANA

E1A014288

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktik tidak jarang terjadi suatu pelanggaran netralitas oleh Pegawai Negeri Sipil, salah satunya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran netralitas tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas melibatkan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Permasalahan yang dibahas adalah peran tim tersebut dalam penegakan hukuman atas pelanggaran netralitas di Kabupaten Banyumas dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam penegakan hukuman atas pelanggaran netralitas Pegawai Negeri, yaitu meneliti data dan kelengkapan berkas laporan kewenangan penjatuhan hukuman, mempersiapkan dan melaksanakan sidang penjatuhan hukuman, memproses hasil sidang, dan melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman sekaligus memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman. Implikasi hukum terhadap diberikannya saran dan pertimbangan atas penjatuhan hukuman oleh Tim tersebut yaitu disesuaikan kriteria pelanggaran yang dilakukan berdasarkan klasifikasi pelanggaran pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi hukuman yang telah diatur di dalamnya.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Netralitas PNS, Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

The Role of the Team's Consideration of Disciplinary Punishment Law in the Enforcement Violation of Neutrality Civil Servants in Banyumas Regency

By :

ERIN PRADANA

E1A014288

ABSTRACT

Civil servant as the elements of the State apparatus in carrying out tasks of Government must be neutral from the influence of all the political parties and not discriminatory in providing service to the community. However, in practice not uncommon a breach of neutrality by civil servants, one of them in an environment of Banyumas Regency Government. The execution of the sentence against the overthrow of the County Government neutrality violations Banyumas involves consideration of the overthrow Team Punishment discipline. The issue discussed was the role of the team in the enforcement of the punishment for violation of neutrality in the Regency of Banyumas and its legal implications.

This research method using normative juridical approach with the approach of legislation and analytical approach. The source of the data used in this research is secondary data. The data obtained are presented in a descriptive in the form of a description drawn up systematically and logically.

Based on the results of the study showed that the role of the team's consideration of removal of public Punishment discipline in the enforcement of penalties for infringement of civil service neutrality, i.e. researching data and completeness of file reports of punishment, the overthrow of authority preparing and implementing the Council of the overthrow of the penalty trial results, process, and report the results of the trial of the overthrow of punishment while simultaneously giving consideration of removal of public punishment. The implications of the law against it gives suggestions and considerations upon the overthrow of punishment by the team i.e. specifications criteria violations committed on the basis of the classification of the infringement on the legislation related to the penalty sanctions set in it.

Keywords : Civil Servant, the Neutrality of Civil Servants, the Team's Consideration of Disciplinary Punishment of the Overthrow